

# **TINJAUAN PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**SRI WAHYUNI**

Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitan Negeri Makassar  
Jl. A.P Pettarani Kampus Gunung Sari Baru Makassar  
Email: [Sriwahyuni.pnr@gmail.com](mailto:Sriwahyuni.pnr@gmail.com)

## **SUMMARY**

The purpose of this paper is to find out how the implementation of vehicle progressive tax in South Sulawesi Province. Data collection techniques used by the writer are interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis, namely data regarding the vehicle progressive tax obtained from the result of the study will be compared with applicable regulations according. Keywords: Implementation of Vehicle Progressive Tax.

**Keywords: Vehicle Progressive Tax.**

## **RINGKASAN**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tarif pajak progresif kendaraan bermotor. Peneliti memperoleh data dari proses wawancara dan dokumentasi. Setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian singkat atau biasa disebut data kualitatif.

**Kata Kunci:** Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

## **PENDAHULUAN**

Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang mana dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah, karena memberi kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek dari PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Untuk menjalankan fungsi pemerataan pajak dalam rangka mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara orang (masyarakat) yang memiliki penghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan rendah, pajak di Indonesia mengenal tarif sebagai instrumen yang digunakan untuk menghitung besar pajak. Berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Tarif pajak kendaraan motor pribadi pertama hanya akan dikenai PKB paling rendah 1,5 persen dan paling tinggi 2 persen terhadap nilai jual, untuk kendaraan kedua dan selanjutnya, tarif PKB dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2 persen dan paling tinggi 10 persen tergantung keputusan pemerintah provinsi.

Dalam Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan Pajak Progresif adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor lebih dari satu kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan sepeda motor 500 cc keatas. Penerapan pajak progresif ini diharapkan bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Dengan pajak ini,

pemilik kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk pemilikan kendaraan kedua dan selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik meninjau lebih lanjut mengenai penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul

**“TINJUAN PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN”.**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Waktu penelitian mulai Maret 2019 - Mei 2019.

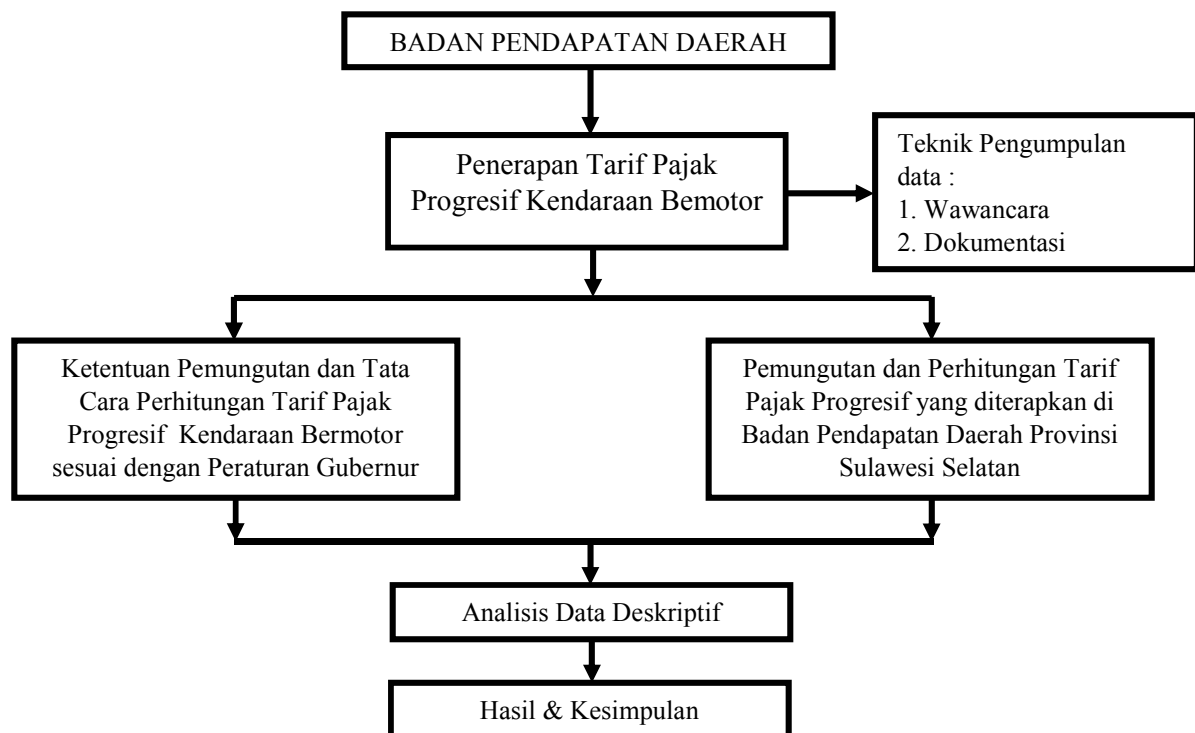
### **B. Variabel dan Desain Penelitian**

#### **1. Variabel Penelitian**

Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi Selatan.

#### **2. Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam secara objektif dan akurat untuk mengarahkan penelitian tepat sasaran. Pelaksanaan penelitian di Badan Pendapatan Daerah yang merupakan objek dari penelitian ini, guna memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan penelitian maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dibandingkan dengan teori dan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2011 untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah. Kemudian, ditarik kesimpulan dan memberikan saran. Adapun skema desain penelitiannya adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Skema Desain Penelitian

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui observasi serta hasil wawancara dengan staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur, serta dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut berupa data jumlah kendaraan dan penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan kepada pihak-pihak seperti Kepala PAD maupun staf kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

### 2. Dokumentasi

Suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berupa data jumlah kendaraan bermotor dan penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor.

## **E. Rancangan Analisis Data**

Rancangan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2014, p. 199), “Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi”. Analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian, akan dibandingkan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah. Kemudian ditarik kesimpulan dan saran.

Berikut langkah-langkah analisis yang digunakan untuk penelitian secara tepat serta mencapai tujuan penelitian, yaitu:

1. Bertanya kepada kepala PAD II Badan Pendapatan daerah tentang bagaimana penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor.
2. Mengumpulkan data-data serta dokumen dari sampel yang telah dipilih.
3. Membandingkan penerapan tarif pajak progresif pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2011.

#### 4. Memberikan kesimpulan deskripsi hasil analisis data.

Dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian akan dilakukan analisis menggunakan metode persentase Riduwan (2010, p. 22) untuk membuktikan penggunaan teori dalam praktek yaitu mengenai penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor.

Adapun prosedur pengujian yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Memisahkan tiap-tiap jawaban responden sesuai dengan jawaban “Ya”, dan “Tidak”.
2. Menjumlahkan berapa banyak jawaban “Ya”, dan “Tidak”.
3. Dari semua jawaban “Ya” dibagi dengan semua jawaban wawancara kemudian dikali 100%.

$$\text{Persentase} = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

F= Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N= *Number of Cases* (jumlah frekuensi)

P= Angka persentase

Persentase hasil penelitian diklasifikasikan menurut ketentuan yang dikemukakan oleh Riduwan (2010, p. 22) yaitu dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Pedoman Kriteria Pengukuran

Tingkat Presentase	Kualifikasi
0% - 20%	Sangat Tidak Sesuai
21%-40%	Tidak Sesuai
41%-60%	Cukup Sesuai
61%-80%	Sesuai
81%-100%	Sangat Sesuai

Dari ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan dengan penjelasan berikut:



1. 0% - 20% : Penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sangat tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif.
2. 21% - 40% : Penerapatan tarif pajak progresif kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif.
3. 41% - 60% : Penerapatan tarif pajak progresif kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif.
4. 61% - 80% : Penerapatan tarif pajak progresif kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif.
5. 81% - 100% : Penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sangat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Semenjak diberlakukannya pajak progresif pada Januari 2011 Badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan pemungutan melalui unit pelaksana teknis badan yang tergabung dalam kantor Bersama SAMSAT (Sistem administrasi manunggal satu atap) memberikan kesempatan kepada wajib pajak dalam mengatur urutan kendaraan bermotor yang dimilikinya berdasarkan urutan kepemilikan dengan memberikan Formulir Pernyataan Kepemilikan kendaraan bermotor. Berdasarkan pernyataan di atas, maka penentuan urutan kendaraan bermotor yang dikenakan progresif yaitu sesuai dengan urutan pembelian kendaraan atau urutan kepemilikan kendaraan bermotor. Setelah wajib pajak mengisi formulir pernyataan kepemilikan kendaraan bermotor dan telah melaporkan kendaraannya, pihak Bapenda bersama operator sistem pada kantor Bersama SAMSAT melakukan :

- a. Cleansing data pada database.
- b. Grouping atau pengelompokan Database.
- c. Penetapan urutan kendaraan bermotor; dan
- d. Pemblokiran kendaraan bermotor berdasarkan database atas kepemilikan kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya.

Pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor dilaksanakan secara bertahap yang di mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, pembayaran, sampai dengan pengesahan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi

Adapun mekanisme perhitungan pajak progresif yaitu dengan terlebih dahulu mengetahui kendaraan tersebut adalah kendaraan kepemilikan keberapa, setelah mengetahuinya barulah dapat dihitung pengenaan dan pajak nya. Pada DPP didalamnya terdiri dari 2 hal yaitu NJKB dan bobot. NJKB atau nilai jual kendaraan bermotor adalah harga pasaran umum dari kendaraan dan tiap

tahunnya nilai jual tersebut berubah sesuai dengan keputusan Menteri dalam negeri. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan dan atau pencemaran lingkungan akibat digunakannya kendaraan bermotor.

## **A. Penyajian Hasil Penelitian**

### **1. Data Perusahaan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah, data yang diambil adalah data penerimaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan objek pajak progresif, dan mekanisme pemungutan serta perhitungan pajak progresif kendaraan bermotor.

### **2. Analisis Data dan Hasil Penelitian**

Penerimaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi kendaraan bermotor roda empat dan roda dua diatas 500cc keatas untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Penentuan urutan kendaraan bermotor yang terkena progresif dapat diurutkan berdasarkan urutan pembelian, misalnya kendaraan yang paling tua itulah kendaraan yang pertama, kendaraan selanjutnya itu kendaraan kedua, kendaraan selanjutnya itu kendaraan ketiga dan seterusnya. Pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor dilaksanakan secara bertahap yang di mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, pembayaran, sampai dengan pengesahan.

Tabel 4 Hasil Wawancara tentang Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator	Jawaban	
		Ya	Tidak
<b>1</b>	<b>Ketentuan Pemungutan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor</b>		
	1. Tarif Progresif dikenakan atas kendaraan bermotor pribadi untuk kepemilikan kedua dan seterusnya?	✓	
	2. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) kepemilikan kedua dan seterusnya diatas 500cc dikenakan tarif pajak progresif ?	✓	
	3. Wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan kendaraan bermotor ?	✓	
	4. Ketentuan urutan kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif sesuai dengan urutan pembelian kendaraan atau urutan kepemilikan kendaraan bermotor	✓	

---

## 2 Tata Cara Perhitungan Pajak Progresif

1. Dasar Pengenaan Pajak kendaraan bermotor adalah NJKB ✓
  2. Dasar Pengenaan Pajak kendaraan bermotor adalah Bobot yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar ✓
  3. Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor ✓
    - a. Kepemilikan ke 2 sebesar 2,5%
    - b. Kepemilikan ke 3 sebesar 3,5%
    - c. Kepemilikan ke 4 sebesar 4,5%
    - d. Kepemilikan ke 5 dan seterusnya sebesar 5,5%
  4. Untuk menghitung besaran tarif pajak progresif Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan Tarif Progresif ✓
- 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (2019)

Berdasarkan hasil wawancara pada tabel diatas, perhitungan persentase menunjukkan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\sum \text{Jawaban ya}}{\sum \text{Wawancara}} \times 100 \\
 &= \frac{8}{8} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis persentase diatas, diperoleh nilai sebesar 100%, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduwan (2010, p. 22) bahwa tingkat persentase hasil wawancara 100% mengindikasikan bahwa ada pengenaan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya. kepemilikan kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) diatas 500cc

maupun roda 4 (empat) dikenakan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya. Dimana dalam hal ini wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan kendaraan bermotornya kemudian ketentuan urutan kendaraan bermotor yang dikenakan tarif pajak progresif sesuai dengan urutan pembelian atau urutan kepemilikan kendaraan bermotor.

Badan Pendapatan Daerah juga telah menetapkan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dimana didalamnya terdapat nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan bobot yang dinyatakan dalam koefisien yang bernilai 1 (satu) atau lebih besar. Badan Pendapatan Daerah juga telah menghitung besaran pengenaan tarif pajak progresif dimana kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5%, kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 3,5%, kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 4,5%, kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya sebesar 5,5%, kemudian menghitung besaran tarif pajak progresif dengan cara dasar pengenaan pajak (DPP) dikalikan dengan tarif progresif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sangat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemungutan dan perhitungan pajak progresif kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sangat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif.

### **B. Saran**

Penerapan Aturan tentang Pajak Progresif harus terus disosialisasikan agar masyarakat menjadi paham tentang penerapan pajak progresif tersebut. Mengoptimalkan pendataan kendaraan bermotor yang termasuk dalam objek pajak progresif, sehingga dapat meminimalisir kendaraan yang sebenarnya dikenakan tarif pajak progresif tetapi dikenakan tarif dasar. Melakukan kordinasi Bersama dengan ketiga instansi yaitu Bapenda, Kepolisian dan Jasa Raharja untuk lebih mengoptimalkan pembinaan ke masyarakat untuk melakukan bea balik nama kendaraan bermotor atas kendaraan baru atau kendaraan bekas yang dibeli agar kendaraan tersebut dapat terlapor dan kendaraan terlapor dapat terdata sebagai kendaraan yang dikenakan tarif pajak progresif maupun yang tidak dikenakan tarif pajak progresif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Daerah, B. P. *Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Nomor 25/I/Tahun 2014 Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Progresif
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 123 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wildan. (2017). *Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Retrieved from <https://www.coursehero.com/file/p61d5a7/Pada-saat-ini-sebagai-negara-berkembang-indonesia/>.

